



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Open Door Policy terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019 - 2024

Verena Lintang Larasati¹, Christian Herman Johan de Fretes², Indra Wisnu Wibisono³

¹Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, 372021010@student.uksw.edu.

²Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, christian.defretes@uksw.edu.

³Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, indra.wibisono@uksw.edu.

Corresponding Author: christian.defretes@uksw.edu¹

Abstract: *The study examines the social dynamics between residents and Syrian refugees in Turkey through the Open Door Policy between 2019 and 2024. The purpose of this study is to analyse the Open Door Policy's impact on society's social dynamics through the principle of humanity. The research employs a descriptive qualitative approach, gathering information in the form of theories, concepts, and data related to the subject matter. Based on an analysis from the perspective of multiculturalism theory, as outlined by Will Kymlicka, this policy aims to foster integration through the concept of social cohesion. The preliminary findings reveal that the dynamics of society under the Open Door Policy result in polarization, discrimination, and negative stigma. This study underscores the necessity for a more comprehensive policy evaluation to address the challenges of social integration and human security effectively.*

Keyword: *Open Door Policy, Syrian, Turkey, Multiculturalism*

Abstrak: Penelitian mengkaji tentang dinamika sosial terhadap penduduk lokal dan pengungsi Suriah di Turki melalui kebijakan *Open Door Policy* pada rentang waktu tahun 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *Open Door Policy* yang membawa dampak pada dinamika sosial masyarakat melalui prinsip kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi berupa teori, konsep, dan data-data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Melalui analisis berdasarkan pandangan teori multikulturalisme menurut Will Kymlicka, kebijakan ini berusaha menciptakan integrasi melalui konsep kohesi sosial. Hasil penemuan sementara dinamika masyarakat melalui *Open Door Policy* menghasilkan polarisasi, diskriminasi, dan stigma negatif dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan integrasi sosial dan keamanan manusia secara efektif.

Kata Kunci: *Open Door Policy, Suriah, Turki, Multikulturalisme*

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan merupakan hal yang memprihatinkan beberapa tahun belakangan ini. Salah satu krisis kemanusiaan yang terjadi adalah perang Suriah sebagai akibat dari peristiwa Arab Spring tahun 2011. Gelombang demonstrasi akibat dari tuntutan penurunan rezim Bashar Al-Assad menyebabkan konflik dan kekerasan yang berakibat pada perang saudara (Yuliansah et al., 2023). Konflik dan kekerasan yang berlarut-larut menyebabkan keamanan manusia masyarakat Suriah menjadi terancam. Dalam hal ini masyarakat Suriah tidak mendapatkan perlindungan dasar sebagai warga negara, baik perlindungan akan kehidupan, mata pencaharian, bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Namun, menanggapi hal tersebut, dunia internasional sudah mulai meninggalkan kesan yang terlalu berfokus pada isu *hard politic* saja. Permasalahan yang terlalu berfokus mengandalkan kekuatan militer atau tekanan ekonomi saja, sekarang diperhatikan juga isu keamanan manusia yang juga menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan.

Permasalahan kemanusiaan didukung oleh pesatnya pertumbuhan pengungsi internasional yang semakin berkembang dan dalam keadaan yang mengkhawatirkan (Zulkarnain, 2017). UNHCR mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk menghindari penganiayaan yang mengancam kehidupan. Pengungsi tersebut biasanya mencari keamanan diluar dari negara asalnya yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya akibat dari perang. Menurut data UNHCR sampai dengan akhir Juni 2024, sudah ada 122,6 juta jiwa yang mengungsi di seluruh dunia. Pengungsi tersebut naik sekitar 5 persen pada akhir tahun 2023 akibat penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran HAM, atau peristiwa lainnya yang diakibatkan oleh isu keamanan manusia (UNHCR, 2024). Sehingga jika dilihat dari gelombang demonstrasi dan perang di Suriah, isu keamanan manusia pada masyarakatnya berdampak pada krisis pengungsi massal jutaan warga Suriah.

Tabel 1. Total Pengungsi Suriah yang Terdaftar

Total Persons of Concern by Country of Asylum [JSON](#)

Location name	Source	Data date	Population
Türkiye	Government of Türkiye	31 Dec 2024	60.9% 2,901,478
Lebanon	UNHCR	31 Dec 2024	15.9% 755,426
Jordan	UNHCR	31 Dec 2024	12.8% 611,473
Iraq	UNHCR	31 Dec 2024	6.4% 303,611
Egypt	UNHCR	31 Dec 2024	3.1% 147,797
Other (North Africa)	UNHCR	31 Dec 2023	0.9% 43,283

Total Registered Syrian Refugees [JSON](#)

4,763,068

Source - UNHCR, Government of Türkiye

Last updated 31 Dec 2024

Sumber: Operational Data Portal UNHCR 2024

Operational Data Portal melaporkan pada tahun 2024 Turki menempati posisi 1 dengan total populasi 2.901.578 jiwa dari total pengungsi Suriah yang terdaftar sebesar 4.763.068 jiwa. Melalui data yang dilaporkan menunjukkan bahwa Turki masih menjadi negara tujuan pertama bagi pengungsi Suriah. Hal tersebut disebabkan karena wilayah Turki yang berdekatan dengan Suriah. Sehingga mudah bagi warga Suriah untuk melarikan diri ke Turki akibat dari konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Melalui persamaan geografis tersebut, Turki menerapkan *Open Door Policy* sebagai respons dan tanggung jawab bersama dalam kemanusiaan. *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka adalah bentuk dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Turki dengan menerima pengungsi terbanyak terutama yang berasal dari Suriah (Suryantama, 2021). Alasan dibalik Turki menerapkan kebijakan tersebut karena alasan kemanusiaan. Hal tersebut didukung dengan adanya ratifikasi akan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Sehingga Turki menerapkan kebijakan perlindungan sementara yang dilandaskan pada 3 prinsip inti. Pertama, keterbukaan bagi orang yang mencari keselamatan di Turki. Kedua, pengungsi tidak dapat dipulangkan tanpa persetujuan pemerintah. Ketiga Turki akan memenuhi

kebutuhan dasar pengungsi. Sehingga melalui kebijakan tersebut banyak masyarakat Suriah mencari perlindungan ke Turki hingga menyebabkan gelombang pengungsi yang besar dari tahun ke tahun.

Dengan adanya *Open Door Policy* di Turki ternyata menimbulkan adanya resistensi dalam masyarakat lokal. Menurut Syrian Barometer yang dikeluarkan oleh UNHCR pada tahun 2020 (Erdogan, 2021), resistensi yang terjadi seperti diskriminasi melalui sikap rasisme dan perbedaan perilaku yang negatif dari masyarakat Turki terhadap orang Suriah. Selain itu berbagai permasalahan akan perlakuan buruk dan dilaporkan ke polisi secara tidak adil sehingga dianggap bersalah. Namun, melalui aspek keamanan perbatasan dalam hal ini pengungsi Suriah yang diperkenankan untuk masuk menimbulkan sebuah permasalahan baru pada sisi keamanan perbatasan. Kelompok teroris seperti ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) masuk ke wilayah Turki bersamaan dengan pengungsi Suriah (Zuhal, 2020). ISIS merupakan pemberontak dibawah kendali milisi Islam yang ingin mendirikan negara Islam khususnya di wilayah Irak dan Suriah. Hal tersebut berdampak pada aktivitas teroris yang berimplikasi terhadap ancaman yang akan dihadapi oleh Turki.

ISIS memiliki basis wilayah di Idlib Suriah yang berbatasan dengan wilayah Turki sebelah utara. Wilayah tersebut merupakan tempat berlindung dan basis operasi aktivitas ISIS termasuk penyusupan anggota melalui pengungsi. Melalui letak Turki yang berbatasan dengan Suriah, memungkinkan Turki untuk dapat menerima serangan dari luar. Sehingga aspek keamanan internal mulai muncul kontradiksi antara masyarakat Turki dengan pengungsi Suriah. Melalui penjelasan singkat diatas mengenai data pengungsi dan dinamika yang terjadi di Turki, pembentukan *Open Door Policy* dapat dikatakan sebagai penyebab dari munculnya permasalahan keamanan manusia baru di Turki. Seperti kehadiran pengungsi yang menciptakan persaingan pasar tenaga kerja, perasaan tidak aman akibat perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat, ketegangan sosial pengungsi akibat perlakuan istimewa pemerintah Turki terhadap pengungsi, dan permasalahan dinamika lainnya sebagai dampak dari pembentukan kebijakan *Open Door Policy* ini (Suryantama, 2021).

Pembentukan *Open Door Policy* murni sebagai respon kemanusiaan yang terjadi. Kebijakan tersebut berdampak pada dinamika sosial yang terjadi antara pengungsi Suriah dan masyarakat lokal di Turki. Dimana melalui kebijakan ini, muncul tantangan dalam menciptakan keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan menjaga kesejahteraan masyarakat lokal. Sehingga, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai perkembangan ilmu hubungan internasional terkait dengan dinamika *Open Door Policy* terhadap penduduk lokal dan pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019-2024. Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisa kebijakan yang mempengaruhi dinamika keamanan manusia baru serta peluang dan tantangan yang muncul. sehingga dalam dapat tercipta lingkungan yang aman bagi seluruh pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Fiantika dkk, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena tersebut digambarkan dalam bentuk kata-kata berdasarkan kondisi apa adanya. Sedangkan deskriptif merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan suatu masalah secara akurat dan sistematis (Fiantika et al., 2022) Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan informasi berupa teori, konsep, dan data-data yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, namun juga berusaha menjelaskan bagaimana *Open Door Policy* dapat membawa isu keamanan manusia bagi pengungsi Suriah dan masyarakat lokal. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini akan dijelaskan menggunakan metode studi literatur melalui berbagai sumber seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, berita, dan sumber dokumen lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan

materi serupa demi memperdalam pembahasan. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deskriptif dalam menjelaskan berbagai informasi yang akan disajikan secara akurat berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kemanusiaan di Suriah dan Kebijakan *Open Door Policy* di Turki

Kebijakan *Open Door Policy* dilatarbelakangi sebagai respon akan konflik Suriah akibat dari situasi yang terjadi di Arab pada abad ke 21. Pada situasi tersebut terdapat pemberontakan yang terjadi pada wilayah Jazirah Arab atau yang biasa disebut dengan fenomena Arab Spring. Fenomena tersebut merupakan bentuk dari dampak gejala politik dan semangat revolusi dari demokratisasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Melalui fenomena Arab Spring, Suriah merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Konflik Suriah bermula ketika terdapat aksi protes dan penangkapan pelajar pada kota Daraa. Pada tahun 2011, pelajar tersebut menulis slogan anti pemerintah yang menginginkan turunnya rezim pada saat itu (Fahham & Kartaatmaja, 2014). Aksi pelajar tersebut kemudian memunculkan reaksi dari rezim Bashir al Assad agar menangkap dan memenjarakan pelajar yang melakukan aksi. Hal tersebut yang kemudian melahirkan gelombang protes akan tuntutan pembebasan pelajar sehingga memunculkan reaksi balik dari tentara Suriah. Konflik yang semakin berkembang dan parah berakibat pada perang sipil.

Eskalasi konflik yang terjadi di Suriah menunjukkan akibat dari tindakan diktator presiden Bashir al-Assad yang menangkap dan membunuh warga sipil sebagai respon akan pemberontakan masyarakat Suriah. Kebijakan yang bersifat diktator menyebabkan konflik seperti militerisasi dan Represi Brutal sejak Arab Spring tahun 2011 meliputi penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan dengan menggunakan senjata berat dan senjata kimia terhadap warga sipil serta wilayah oposisi (Hedemann, 2013). Akibat dari tindakan tersebut menghasilkan konflik yang berkepanjangan sehingga lebih dari 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan menjadi korban terhadap kebijakan dari Bashir al-Assad (UNHCR, 2025). Selain itu, warga Suriah merasakan kemiskinan dan pengangguran dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan terhadap warga Suriah kemudian berakibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar termasuk akses kepada air bersih, listrik, makanan, obat-obatan, dan sewa rumah.

Fenomena pemerintahan Suriah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjelaskan akan pengungsi Suriah yang sedang dalam situasi dimana negaranya tidak dapat memperjuangkan keamanan manusia, keselamatan fisik, dan hak asasi dasar sebagai manusia. Akibat dari krisis kemanusiaan tersebut, warga Suriah mencari suaka sebagai imbas akan situasi yang tidak stabil terhadap keamanan negara asal (Suryantama, 2021). Pencari suaka merupakan seseorang yang memiliki maksud untuk mencari atau sedang menunggu keputusan atas permintaan mereka untuk perlindungan internasional. Berbeda halnya dengan pengungsi, pencari suaka merupakan seseorang yang telah atau bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk diakui menjadi pengungsi, namun permohonan mereka belum diproses (UNHCR, n.d.). Sedangkan pengungsi merupakan seseorang yang terpaksa untuk meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali karena ancaman serius akan kehidupannya di negara asal.

Masyarakat Suriah berdatangan ke Turki disebabkan oleh jarak geografis yang dekat. Pengungsi Suriah mulai berdatangan ke Turki sejak tahun 2011 dan tidak tetap, dalam hal ini jumlah pengungsi Suriah bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah pengungsi berdatangan bersifat fluktuatif dikarenakan situasi keamanan Suriah yang berubah-ubah. Jika konflik dalam negeri yang meningkat, maka jumlah pengungsi juga meningkat, begitu juga sebaliknya (Kamila & Mahendra, 2023). Menurut UNHCR hingga bulan Mei tahun 2025, total jumlah pengungsi Suriah sebesar 4.526.043. Melalui data tersebut, 60% dari populasi mencari perlindungan ke Turki sebagai akibat dari eskalasi konflik dalam negeri Suriah.

Dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Suriah, Turki memutuskan menerapkan kebijakan untuk pengungsi yang dinamakan *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka. Kebijakan tersebut merupakan tanggapan kemanusiaan yang menonjolkan peran Turki dalam meringankan krisis pengungsi (Suryantama, 2021). Pada tahun 2011 dalam sebuah konferensi UNHCR di Jenewa, menteri dalam negeri mengumumkan bahwa Turki sedang menerapkan rezim "*Temporary Protection*" atau perlindungan sementara bagi pengungsi Suriah. Dalam konferensi tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan sementara merupakan arah kebijakan yang terinspirasi dari "*EU Temporary Protection Directive*" yang berlandaskan pada 3 prinsip inti kemanusiaan. Pertama perbatasan Turki akan tetap selalu terbuka bagi mereka yang mencari keselamatan di Turki. Kedua, tidak ada pemulangan pengungsi Suriah tanpa adanya persetujuan dari pengungsi tersebut, Terakhir Turki menerapkan kebutuhan akan kemanusiaan dasar bagi pengungsi (ECRE, 2022)

Respon kemanusiaan yang diterapkan oleh Turki disebabkan oleh beberapa faktor. Turki merupakan salah satu negara yang menggunakan diplomasi kemanusiaan (Gilley, 2015). Hal tersebut dimulai pada masa demokratisasi Turki setelah tahun 1983. Gelombang perang dingin yang pada masa tersebut menimbulkan tuntutan kemanusiaan pada kebijakan luar negeri di Turki. Perang yang terjadi di perbatasan Turki, perang Iran dan Irak, konflik Balkan dan Armenia - Azerbaijan, perang Irak dan Afganistan, dan krisis Suriah yang menyebabkan Turki meningkatkan kapasitas kemanusiaan. Selain itu, motif kemanusiaan yang dilakukan oleh Turki dapat diterapkan oleh kewajiban moral Turki sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang tertinggi di kawasan Timur Tengah (Suryantama, 2021). Dalam hal ini menempatkan Turki sebagai negara yang seakan wajib membantu stabilitas Kawasan dan permasalahan HAM di Kawasan Timur Tengah. Sehingga Turki menerima pengungsi Suriah dan menerapkan prinsip kemanusiaan pemulangan pengungsi Suriah tanpa paksaan dan komitmen memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Suriah yang tinggal di Turki

Selain penerapan kebijakan yang dilakukan atas dasar motif kemanusiaan, Turki juga menerapkan kebijakan yang didasarkan pada motif persamaan identitas. Persamaan identitas tersebut diinisiasi dari partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*). AKP merupakan partai yang sedang berkuasa di Turki dan memiliki persamaan pandangan dalam identitas bahwa Turki merupakan negara Islam yang berakar pada Kekaisaran Ottoman. Sehingga dalam menerapkan kebijakan, partai AKP mendasarkan pada 3 karakteristik (Drewski & Gerhards, 2024). Pertama Turki berusaha dalam menyembunyikan batas budaya negara bangsa dan merujuk pada historis Kekaisaran Ottoman. AKP memandang bahwa komunitas yang sedang dikembangkan oleh Turki merujuk pada batas-batas teritorial kekaisaran Ottoman. Jika melihat pada faktor historis, kekaisaran Ottoman yang didirikan oleh suku di Turki berkembang dan meluas hingga wilayah Timur Tengah dan Jazirah Arab. AKP dalam hal ini merujuk pada kejayaan masa lalu mengenai identitas Turki dari kekaisaran Ottoman. Sehingga dalam hal ini Turki seakan memiliki tanggung jawab secara khusus dalam menjaga keamanan wilayah bekas kekaisaran Ottoman.

Kedua, karakteristik Turki yang menyembunyikan batas negara dan merujuk pada Islam. Menurut presiden Turki Erdogan, warga Suriah digambarkan sebagai saudara dan saudari muslim. Dalam membentuk kerangka budaya (Gilley, 2015). Hal tersebut didukung oleh partai yang dipelopori oleh presiden Erdogan. Kebijakan dalam politik luar negeri yang terlihat fleksibilitas dan disesuaikan dengan nilai dasar partai tersebut yakni ajaran Islam (Gumilar, 2016). Titik acuan dalam menentukan siapa yang membatasi dalam hal ini bukan hanya terpaku dalam negara bangsa saja namun acuan akan komunitas muslim dalam menunjukkan solidaritas sesama umat beriman.

Ketiga, dalam kaitannya dengan persamaan identitas, kedatangan warga Suriah ke Turki dianggap sebagai "*Emanet*" atau dapat dikatakan amanat Tuhan bagi orang Turki (Polat, 2018). Sehingga dalam artian tersebut, partai AKP merasa adanya kewajiban moral untuk menjaga pengungsi Suriah dari bahaya keamanan manusia yang sedang terjadi. Didukung oleh

pernyataan dari presiden Erdogan bahwa Turki merupakan bangsa yang memiliki kesadaran akan saudara sesama muslim. Dalam hal ini saudara muslim yang datang ke Turki diperlakukan sebagai muhacir (migran) dan menyambutnya dengan ramah. Fokus pada belas kasih nilai-nilai Islam seakan menuntut Turki dalam memiliki tanggung jawab dalam merangkul pengungsi Suriah. Sehingga, penerapan *Open Door Policy* merupakan bentuk pandangan Erdogan akan kesamaan identitas dengan pengungsi Suriah sesuai dengan pidatonya pada tahun 2015:

“Saat ini kita dapat menghadapi ancaman menyusul beragam kekacauan yang mengelilingi kita semua ini bersaudara. Ini adalah kewajiban sosial kami dan perhatian kami sebagai pemeluk Islam” (Utami, 2015). Melalui pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan *Open Door Policy* yang telah dikeluarkan oleh Turki didasarkan pada motif kemanusiaan pada identitas Turki dan Suriah. Hal tersebut yang kemudian secara implisit Turki memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kemanusiaan terhadap warga Suriah.

Penerapan *Open Door Policy* merupakan hasil dari ratifikasi *Convention and Protocol of Refugees* mengenai status pengungsi. Hasil ratifikasi konvensi tersebut menghasilkan kebijakan dan diatur dalam hukum nasional Turki LFIP (*Law on Foreigner and International Protection*). Kebijakan yang mempertimbangkan *Convention and Protocol of Refugees* mengatur tentang perlindungan orang asing, pencari suaka, dan perlindungan sementara. Pertimbangan tersebut berlandaskan asas kemanusiaan dan prinsip *Non Refoulement* (Turkish Government, 2013). Artinya, hukum yang berlaku dalam negara tidak memperbolehkan seseorang mengembalikan ke suatu tempat dalam hal ini adalah negara asal Suriah. Hal tersebut disebabkan karena masih tidak adanya keamanan manusia di negara asal.

Turki menganggap bahwa implementasi kebijakan dan diatur dalam hukum negara merupakan bentuk dari komitmen Turki berdasarkan Konvensi Internasional. Selain itu, penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk dari implementasi perlindungan dan keamanan manusia. Analisis perlindungan dan keamanan manusia dapat terlihat hukum nasional Turki LFIP pasal ke 91.

(1) *Temporary protection may be provided for foreigners who have been forced to leave their country, cannot return to the country that they have left, and have arrived at or crossed the borders of Turkey in a mass influx situation seeking immediate and temporary protection.*

(2) *The actions to be carried out for the reception of such foreigners into Turkey; their stay in Turkey and rights and obligations; their exit from Turkey; measures to be taken to prevent mass influxes; cooperation and coordination among national and international institutions and organisations; determination of the duties and mandate of the central and provincial institutions and organisations shall be stipulated in a Directive to be issued by the Council of Ministers.*

Dalam kaitannya dengan keamanan manusia, Turki mengimplementasikan sebuah hukum negara berdasarkan dengan prinsip keamanan manusia sesuai dengan UNDP. Implementasi keamanan manusia pada UNDP tertuang melalui LFIP ayat 1 dan 2. Pemahaman pertama bahwa keamanan manusia harus sesuai dengan prinsip *People Centred*. Penjelasan mengenai pendekatan yang memperhatikan situasi manusia mengenai kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat manusia terutama pada kelompok yang rentan. Hukum nasional Turki LFIP tersebut memiliki analisis pada tingkat individu sebagai objek yang harus ditangani akibat dari ancaman keamanan manusia di Suriah. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggambaran hak yang diterima oleh pengungsi pada ayat ke 2 LFIP.

Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip keamanan manusia menurut UNDP menekankan akan analisis *Comprehensive*. Dimana dalam hal ini masing-masing negara memperlihatkan agenda yang berkaitan dengan keamanan manusia. Hukum nasional LFIP yang kemudian diimplementasikan menjadi *Open Door Policy* merupakan hasil dari agenda keamanan manusia di Turki. Dimana Turki dalam mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan

ditulis dalam kebijakan LFIP tersebut. Melalui pendekatan *Context Specific* Turki berusaha melihat ancaman kemanusiaan yang sedang terjadi di Suriah. Sehingga Turki mempertimbangkan prinsip *Non-Refoulement* atau tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal sebagai bentuk respon yang berorientasi akan pencegahan (*Prevention Oriented*).

Implementasi dan Tantangan *Open Door Policy* di Turki

Law on Foreigner and International Protection atau LFIP merupakan hukum nasional Turki yang menjadi dasar terbentuknya *Open Door Policy*. LFIP dibentuk berdasarkan pertimbangan multikultural. Turki menerapkan kerangka kerja dengan berdasarkan konsep dari “Kohesi sosial” dalam kebijakannya. Menurut Erdogan, konsep kohesi sosial dapat menjawab berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang paling potensial dalam dinamika masyarakat (Erdogan, 2021). Kohesi sosial digunakan untuk mengungkapkan kondisi bagi minoritas dalam masyarakat Turki agar tidak dipandang sebagai ancaman terhadap perdamaian sosial. Sehingga hubungan antara minoritas yang dalam hal ini adalah pengungsi dan mayoritas dalam hal ini adalah masyarakat Turki, dapat hidup berdampingan serta mengesampingkan konflik dan ketegangan. Kohesi sosial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan undang-undang tentang orang asing dan perlindungan nasional. Dimana dalam hal ini Turki menolak pandangan asimilasi atau adopsi dari budaya dominan. Namun landasan filosofis yang mendefinisikan kohesi sosial sebagai landasan hidup dimana berbagai komunitas dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni atas dasar kebersamaan (Erdogan, 2021). Sehingga menurut pandangan tersebut pluralisme diakui dan diterima atas dasar penghormatan bersama.

Landasan filosofis tersebut dibentuk berdasarkan pandangan pluralisme yang diimplementasikan menjadi kebijakan dalam perlindungan semua komunitas. Kebijakan perlindungan dan regulasi di Turki dilandaskan pada prinsip kohesi sosial dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi pengungsi (Erdogan, 2021). Kebijakan mengenai hukum tersebut mencakup regulasi dalam perlindungan sementara. Hal tersebut didasarkan tidak hanya pada pandangan idealis namun juga hasil dari ratifikasi terhadap *Convention and Protocol Refugee*. Selanjutnya, regulasi tersebut digunakan dalam melandasi bentuk perlindungan awal Turki terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan hubungan sosial bagi pencari suaka dan pengungsi Suriah.

Dalam hal pendidikan, Turki berupaya dalam memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi Suriah. Fasilitas pendidikan yang diberikan merupakan Pusat Pendidikan Sementara (*Temporary Education Centres*) dan sekolah negeri di Turki mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Kırdar et al., 2023). Pengajar dalam Pusat Pendidikan Sementara merupakan warga Suriah. Kurikulum pendidikan yang diajarkan adalah kurikulum Suriah. Hingga bahasa yang digunakan merupakan bahasa Arab. Pemerintah Turki juga membantu perekonomian pengungsi Suriah dengan memberikan kartu debit 100 Lira atau (30 USD) setiap bulannya (Gumilar, 2016). Bantuan tersebut digunakan untuk orang tua dalam membantu perekonomian terutama transportasi akibat dari jarak antara kamp pengungsian dan Pusat Pendidikan Sementara tersebut relatif jauh.

Selain pendidikan, pemerintah Turki juga menyediakan proteksi dalam bentuk layanan kesehatan untuk pengungsi Suriah. Layanan kesehatan tersebut pertama kali didirikan pada 29 April 2011 di kamp-kamp pengungsian (Tayfur et al., 2019). Layanan proteksi yang diimplementasikan oleh pemerintah Turki termasuk salah satunya adalah layanan kesehatan telah mengikuti seluruh rangkaian dari pedoman *sphere*. Pedoman *sphere* merupakan proyek kemanusiaan yang diinisiasi oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Pedoman tersebut meliputi standar minimum dalam pelayanan kesehatan termasuk pasokan air, sanitasi, promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi, hunian, permukiman dan bantuan non pangan dan kesehatan (The Sphere Project, 2011). Seperti yang dilakukan terhadap pengungsi Suriah, Turki memberikan fasilitas proteksi layanan kesehatan. Hal tersebut seperti

air minum dan distribusi air bersih, memberikan manajemen keamanan logistik dan distribusi kamp, rumah sakit dan unit kebakaran di dekat kamp pengungsian, serta fasilitas perawatan kesehatan yang telah dirancang di setiap kamp-nya (Tayfur et al., 2019). Layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Turki merupakan langkah preventif bagi para pengungsi Suriah agar tidak menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat bagi populasi tempat para pengungsi tinggal sesuai dengan standar internasional *sphere*.

Pemerintah Turki juga memberikan izin bekerja kepada pengungsi Suriah pada Januari 2016 (Erdogan, 2021). Pemberian izin kerja tersebut melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial di Turki agar regulasi atas hak-hak kemanusiaan pengungsi dapat terpenuhi. Izin kerja dapat diperoleh setelah 6 bulan tinggal di Turki sebagai pengungsi di bawah status perlindungan sementara. Berdasarkan pasal 29 peraturan mengenai perlindungan sementara, pekerja Suriah di bawah perlindungan sementara terdapat pembatasan pekerjaan. Dalam hal ini Pengungsi Suriah tidak dapat melamar pekerjaan yang bersifat eksklusif yang dibatasi oleh warga negara Turki berdasarkan hukum. Dengan kata lain, pengungsi Suriah diperkenankan untuk melamar pekerjaan seperti bertani, menggembala, ternak, dan sebagainya dengan rata-rata penghasilan per bulan sekitar 700 lira (Tayfur et al., 2019). Pendapatan yang diberikan kepada pengungsi Suriah berbeda dengan pendapatan warga lokal Turki dengan upah minimal 1300 lira.

Implementasi *Open Door Policy* melalui *protection and regulation* tersebut berdasarkan regulasi internasional terhadap *Convention and Protocol Refugee* yang menekankan pada hak-hak dasar pengungsi serta tanggung jawab Turki sebagai negara pemberi perlindungan dan negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup dalam merespon kemanusiaan secara efektif. Diperlukannya standar operasional yang konkret di lapangan seperti standar *Sphere. Protection and Regulation* dari Konvensi dan Standar *Sphere* menempatkan pandangan dalam kerangka yang lebih luas yakni keamanan manusia. Dua pemahaman dasar dari falsafah *sphere* dalam mendukung hak asasi manusia antara lain:

- 1) Bagi mereka yang terkena bencana atau konflik memiliki hak asasi dalam hidup dan bermartabat, sehingga mereka memiliki hak dalam mendapatkan bantuan.
- 2) Berbagai langkah dimungkinkan untuk diambil dalam meringankan beban penderitaan akibat dari bencana atau konflik. (The Sphere Project, 2011)

Implementasi *Open Door Policy* melalui penerapan standar *Sphere* menekankan akan pentingnya respons kemanusiaan terhadap konteks budaya. Dimana dalam hal ini menekankan pentingnya akomodasi dan menghormati praktik-praktik budaya dalam membangun kembali identitas dan kehormatan dari individu (The Sphere Project, 2011). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Will Kymlicka dalam bukunya *Multicultural Citizenship* menekankan akan penghargaan akan martabat manusia. Kymlicka berpendapat bahwa imigran yang datang ke suatu negara karena alasan kemanusiaan. Imigran tersebut harus diintegrasikan ke dalam lapisan masyarakat dengan menghormati hak-hak mereka sebagai individu (Kymlicka, 1995). Sedangkan dalam konteks kebijakan Kymlicka mendukung pertahanan identitas budaya sambil tetap dapat berpartisipasi dalam hal sosial dan ekonomi pada negara tujuan.

Dalam pandangannya mengenai imigran, Kymlicka mengklasifikasikan sebagai kelompok *polyethnic* dalam konteks *polyethnic states*. Hal tersebut merujuk pada konteks keberagaman budaya suatu negara akibat dari migrasi individu atau keluarga bukan negara yang sudah memiliki beberapa kelompok nasional atau sejarah kolonialisme (Kymlicka, 1995). Imigran dalam konteks *polyethnic* tidak menuntut otonomi politik teritorial. Melainkan penekanan pada hak *polyethnic* seperti perlindungan hukum terhadap praktik budaya dan dukungan finansial atas pengakuan perbedaan budaya imigran tersebut. Kymlicka melihat hak budaya sebagai bagian dari martabat individu (Kymlicka, 1995). Sehingga dalam pembuatan kebijakan, diperlukan juga penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif terhadap keberagaman imigran.

Turki melalui *Open Door Policy* berusaha dalam menyesuaikan kebijakan yang inklusif terhadap imigran Suriah. Turki melakukan strategi pendekatan harmonization sebagai bentuk integrasi pengungsi ke dalam masyarakat tanpa adanya paksaan asimilasi penuh (Erdogan, 2021). Sejalan dengan pandangan Kymlicka mengenai hak *polyethnic*, pemerintah Turki menerapkan *Open Door Policy* yang lebih memilih pada kebijakan yang memungkinkan pengungsi dalam mempertahankan identitas budaya dan tetap memiliki kebebasan dalam kehidupan sosial. Hingga tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh Turki bukan merupakan asimilasi namun kohesi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal (Erdogan, 2021).

Namun, dalam penerapannya terjadi kritik dari partai oposisi Turki akibat ketidakseimbangan dinamika yang terjadi. Partai Oposisi Turki *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) atau Partai Rakyat Republik memiliki pandangan berbeda mengenai kebijakan migrasi pengungsi Suriah ini. Menurut CHP pengungsi Suriah merupakan ancaman ekonomi bagi Turki (Drewski & Gerhards, 2024). Turki sudah menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi yang sudah berlangsung sejak 2018. Kenaikan tingkat inflasi di Turki yang mencapai 83,5% pada akhir September tahun 2022 (Maruf, 2022). Sedangkan anggaran dalam memenuhi kebutuhan kamp pengungsi seperti fasilitas kesehatan, kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan beberapa kebutuhan yang lain tetap terus berjalan. Sehingga perkiraan pengeluaran dana pada tahun 2019 meningkat menjadi USD 40 miliar (Izzatinnisa et al., 2022). Bantuan dana yang berlebih terhadap pengungsi Suriah tidak sebanding dengan konflik yang terjadi di negaranya. Melalui inflasi masyarakat Turki banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat sulit membayar sewa untuk tempat tinggal. Sedangkan pemerintah memberi kesempatan yang sama terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan antara pengungsi Suriah dan masyarakat lokal. Dalam hal ini partai CHP menilai semakin negatif terhadap penerimaan pengungsi di Turki (Drewski & Gerhards, 2024). Akibat terlihat akan perbedaan prioritas pemerintah antara pengungsi Suriah dan masyarakat lokal.

Dalam pandangan multikultural, CHP menolak konsepsi partai AKP mengenai pandangan kemanusiaan berdasarkan asas persamaan Kekhalifahan Ottoman. CHP memandang bahwa arah kebijakan Turki berdasarkan pemikiran kemalist. Dimana dalam hal ini, Turki merupakan negara hukum yang kebijakannya mendukung pada modernisasi menggantikan sistem monarki. Sehingga sistem pemerintahan didasarkan pada sistem demokrasi yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Bagi CHP berdasarkan pemikiran kemalist, perlu dibedakan antara kontrol agama dan negara, atau yang biasa disebut dengan sekularisasi (Drewski & Gerhards, 2024).

Polemik yang terjadi melalui kebijakan tersebut menghasilkan politik identitas. CHP merupakan partai oposisi yang melakukan penolakan terhadap pandangan identitas pengungsi menurut partai AKP. Partai CHP berpandangan bahwa Turki merupakan negara “Barat” dan berfokus pada ideologi sayap kiri (Drewski & Gerhards, 2024). Partai CHP sendiri memiliki orientasi sekuler yang bersikap skeptis terhadap pengungsi Suriah. Pandangan tersebut didukung oleh kegagalan tinjauan politik dari partai CHP terhadap kegagalan penerapan multikulturalisme yang terjadi di Eropa pada tahun 1970. Penolakan politik multikulturalisme tersebut terjadi karena imigran etnis yang beragama Islam dianggap sebagai ancaman bagi bangsa barat (Nurdin, 2015). Hal tersebut dilandasi oleh ideologi Islam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan, demokrasi, promosi hak-hak sosial, dan sebagainya. Pandangan terhadap sekularisasi tersebut yang menjadi tinjauan dari partai oposisi sehingga terjadi skeptisme terhadap imigran pengungsi, yang dimana partai oposisi mendukung sekularisasi yang ada di Turki.

Dukungan terhadap sekularisasi yang terjadi kemudian dibahas sebagai salah satu isu yang diangkat dalam pemilu tahun 2023. Namun sebelum itu, gerakan sentimen anti Suriah sudah semakin besar di beberapa komunitas Turki sebelum pemilihan pada tahun 2019 (Donelli, 2023). Sehingga dalam politiknya, partai oposisi telah didukung oleh komunitas di

Turki dengan akan landasan sentimen tersebut. Selain dari pandangan politik identitas, skeptisme yang terjadi antara partai oposisi bersama dengan masyarakat didukung dengan maraknya organisasi-organisasi bersenjata seperti ISIS yang bermukim di perbatasan Suriah (Abidin & Wibowo, 2024).

Seperti provinsi Idlib di Suriah yang berbatasan dengan Turki. Provinsi yang dikuasai oleh pemberontak seperti ISIS serta di bawah kendali milisi Islam terkhusus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) (Hodali, 2024). Kelompok tersebut merupakan kelompok yang disebut dengan Front Al-Nusra berafiliasi dengan al-Qaeda. Melalui dinamika sosial di perbatasan sehingga dapat memicu meningkatnya potensi ancaman pada perbatasan keamanan nasional Turki. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang miskin dan sekitar 2,9 juta pengungsi berada pada kawasan perbatasan tersebut (Hodali, 2024). Kawasan tersebut juga merupakan kawasan yang bergantung pada donor internasional terutama bantuan kemanusiaan di Turki.

Kebijakan migrasi pengungsi yang dirancang oleh pemerintah atas dasar nilai-nilai partai AKP seakan menjadi bumerang terhadap ancaman kemanusiaan. Semula kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip keamanan manusia yang inklusif berubah menjadi ancaman yang berafiliasi pada individu atau organisasi teroris seperti ISIS. Tekanan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2020 tersebut mendorong kembali gerakan sentimen anti migran dan kritik dari partai oposisi (Hodali, 2024). Kritik tersebut terjadi akibat dari kebijakan pemerintah serta dampak dinamika yang terjadi akibat dari faktor demografis provinsi perbatasan.

Dampak *Open Door Policy* terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019-2024

Penerapan *Open Door Policy* berdampak pada dinamika sosial yang terjadi di Turki. Dalam Syrian Barometer terdapat beberapa poin hasil observasi mengenai dampak *Open Door Policy* terhadap penerimaan pengungsi Suriah di Turki. Bagi masyarakat lokal, kehadiran pengungsi Suriah menimbulkan kekhawatiran akan keamanan (Erdogan, 2023). Masyarakat Suriah dalam hal ini diberikan keuntungan yang lebih banyak pada beberapa bidang.

Tabel 3. Data Mengenai Respon Masyarakat Turki terhadap Pengungsi Suriah

SB-2023-T-Table 15 (+Figure): Please state which of the following statements you find most appropriate to describe Syrians (Multiple Responses)

Rank		SB-2017		SB-2019		SB-2020		SB-2021		SB-2022		SB-2023	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
1	They are people who will cause social and economic problems in our country in the future	814	39,0	954	42,0	518	22,9	917	40,7	878	38,7	1118	50,0
2	They are burdens on us	899	43,0	896	39,5	755	33,4	859	38,1	1169	51,6	880	39,3
3	They are people who did not protect their homeland	-	-	940	41,4	559	24,7	846	37,5	757	33,4	880	39,3
4	They are different and foreign to us	376	18,0	448	19,7	206	9,1	373	16,6	340	15,0	645	28,8
5	They are victims who escaped persecution/war	1208	57,8	794	35,0	863	38,2	758	33,6	684	30,2	574	25,6
6	They are guests in our country	424	20,3	495	21,8	512	22,7	409	18,2	288	12,7	363	16,2
7	They are people exploited as cheap labor	298	14,3	308	13,6	290	12,8	399	17,7	359	15,8	333	14,9
8	They are our brothers and sisters with the same religion	433	20,7	446	19,6	366	16,2	270	12,0	222	9,8	281	12,6
9	They are harmless people	306	14,6	158	7,0	165	7,3	197	8,7	139	6,1	168	7,5
10	They are beggars/people who entirely rely on assistance	509	24,4	343	15,1	257	11,4	216	9,6	230	10,1	163	7,3
11	Other	15	0,7	42	1,8	14	0,6	21	0,9	21	0,9	15	0,7
	No idea/ No response	32	1,5	20	0,9	33	1,5	27	1,2	28	1,2	25	1,1

Sumber: Syrian barometer 2023

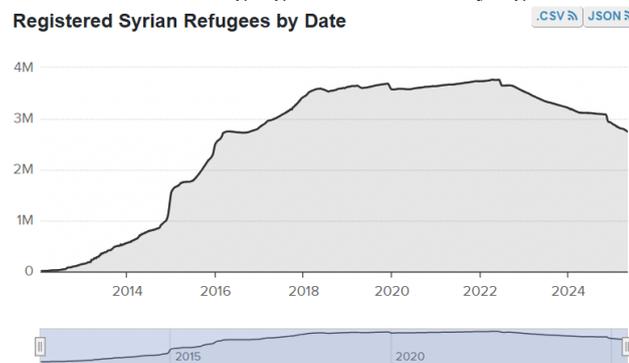
Melalui penelitian tersebut dijelaskan mengenai bagaimana masyarakat Turki melihat atau mendefinisikan interaksi yang terjadi dengan masyarakat Suriah. Respon pada peringkat pertama adalah masyarakat Suriah merupakan orang yang menyebabkan masalah sosial dan ekonomi di Turki pada masa depan. Kemudian pada peringkat kedua respon yang terjadi bagi pengungsi Suriah yang merupakan beban bagi masyarakat lokal Turki. Dilanjutkan dengan

pengungsi yang tidak dapat melindungi tanah air mereka. Kemudian pandangan akan perbedaan pengungsi yang asing bagi masyarakat Turki.

Pertama, respon mengenai masyarakat Suriah merupakan orang yang menyebabkan masalah sosial dan ekonomi di Turki pada masa depan bersamaan dengan respon masyarakat Suriah yang merupakan beban bagi masyarakat Turki. Respon tersebut merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat lokal terhadap arus migrasi pengungsi besar-besaran. Sedangkan melalui kebijakan pemerintah Turki, masyarakat Suriah memiliki hak akan kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lokal. Kecemasan masyarakat lokal akan kehilangan pekerjaan dikarenakan munculnya secara tiba-tiba tenaga kerja yang murah pada pengungsi Suriah (Erdogan, 2024). Kecemasan tersebut terjadi pada wilayah pinggiran bukan pada wilayah kota di Turki. Masyarakat Turki dalam hal ini tidak menjadikan pekerjaan tersebut masalah di negaranya.

Namun, pada Syrian Barometer 2022 dijelaskan mengenai kebijakan diskriminatif pekerja dan membuka tempat usaha antara pengungsi Suriah dan masyarakat lokal Turki. Masyarakat lokal Turki menolak dalam hal pekerjaan informal dan tenaga kerja yang murah untuk memingginkan orang Suriah bekerja secara adil dan layak (Erdogan, 2023). Diskriminasi terjadi karena adanya persaingan pasar antara masyarakat Suriah dengan warga lokal. Masyarakat Suriah sebaiknya diaudit lebih ketat lagi dalam hal bekerja dan membuka tempat usaha. Dapat dikatakan bahwa beberapa usaha suriah menjalankan bisnis dengan harga dibawah pasar yang merugikan bisnis masyarakat lokal yang beroperasi pada area yang sama. Selain itu, bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Suriah sering tidak memiliki pengawasan terhadap kewajiban membayar pajak. Pandangan akan situasi tersebut yang kemudian menghasilkan kritik dari masyarakat Turki. Jika masyarakat Suriah mau diterima maka ketentuan mengenai kebijakan usaha diatur lebih ketat tanpa adanya diskriminasi antara masyarakat Suriah dan lokal. Karena jika pengawasan akan dinamika sosial dan ekonomi tidak dijalankan dengan ketat, maka akan merugikan masyarakat lokal dari tahun ke tahun yang sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan regulasi di negaranya.

Tabel 4. Jumlah Pengungsi Suriah di Turki yang Terdaftar
Registered Syrian Refugees by Date



Source - Government of Türkiye

Sumber: UNHCR Registered Syrian Refugees by Date

Jika dilihat melalui data tersebut, nampak kenaikan pengungsi yang terjadi setelah dari tahun 2015. Melalui gelombang pengungsi yang terjadi menyebabkan Turki membuat kebijakan ketat terhadap pengungsi Suriah. Hal tersebut berakibat pada kewalahan Turki dalam menangani gelombang pengungsi. Pengungsi tidak dapat tertampung lagi dalam kamp pengungsian. Pemerintah dalam hal ini juga kewalahan dalam menyediakan akomodasi yang didanai negara terhadap masyarakat Turki yang mencari suaka (ECRE, 2022). Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan masalah seperti tuna wisma dan kondisi kehidupan masyarakat Suriah yang dibawah standar.

Pada tahun 2019 pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan repatriasi terkhusus bagi pengungsi yang tidak memiliki surat izin tinggal (Izzatinnisa et al., 2022). Kebijakan pemulangan tersebut juga didukung oleh partai oposisi beserta dengan sebagian dari kelompok

masyarakat Turki. Kebijakan tersebut berdampak pada pengungsi terutama keadaan yang terjadi di Suriah belum sepenuhnya pulih serta. Banyak pengungsi di Suriah juga tidak memiliki kepastian status hukum. Dimana dalam hal ini pengungsi hanya memperoleh status sementara yang tidak dapat mengakses hak-hak penuh dan integrasi jangka panjang. Selain itu, tahun 2019-2020 melalui wabah Covid-19 Turki terus mengalami inflasi. Inflasi yang terjadi disebabkan karena Turki terus menampung pengungsi Suriah dalam kebijakan perlindungan sementara. Penampungan pada camp pengungsi mengakibatkan bantuan dana pengungsi Suriah yang lebih besar terutama melalui pandemi Covid-19. Melalui inflasi yang terjadi, pengungsi Suriah masih mendapatkan hak yang sama sesuai dengan aturan dari perlindungan sementara LFIP di Turki. Pengungsi diberi bantuan dan kesempatan kerja yang sama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan anggaran dalam memenuhi kebutuhan kamp pengungsi seperti fasilitas kesehatan, kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan beberapa kebutuhan yang lain tetap terus berjalan. Sehingga perkiraan pengeluaran dana pada tahun 2019 meningkat menjadi USD 40 miliar (Izzatinnisa et al., 2022).

Pada tahun 2021-2022, pemerintah Turki menerapkan kebijakan dekonsentrasi. Melalui kebijakan tersebut menetapkan kota-kota utama dan kota di pesisir tidak lebih 25% penduduk merupakan warga negara asing. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adanya kebijakan penonaktifan pendaftaran sebagai pemohon perlindungan internasional dan beberapa lingkungan di Turki ditutup bagi warga negara asing yang mencari perlindungan sementara bahkan izin tinggal. Bagi masyarakat Suriah, repatriasi dan kebijakan dekonsentrasi tidak selamanya sesuai dengan yang sesuai dengan ketentuan dari hukum internasional atas dasar kemanusiaan. Beberapa orang mengaku tidak diberitahu kemana harus pergi. Namun, beberapa orang lain dikembalikan ke Turki ke kota-kota yang disebut zona aman (Hodali, 2024). Kebijakan repatriasi atau pemulangan dapat dilakukan jika wilayah negara asal sudah aman dari kekerasan atau konflik. Namun, pada kenyataannya wilayah Suriah belum membaik dari konflik dalam negaranya. Dalam laporan Human Right Watch, kebijakan Turki tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam menjamin keamanan penduduk sipil dan kehidupan penduduknya yang diwarnai dengan pelanggaran hukum dan ketidakamanan (Hodali, 2024).

Pada akhir tahun 2022-2023 isu pengungsi menjadi sangat politis selama masa pemilihan presiden. Partai oposisi membawa isu pengungsi dengan pandangan retorika anti pengungsi (Drewski & Gerhards, 2024). Menurut partai oposisi, Turki sudah berhadapan dengan masalah ekonomi akibat dari bantuan kemanusiaan pengungsi. Partai oposisi menggunakan pengertian pengungsi merupakan ancaman ekonomi dan keamanan. Partai oposisi didukung sekitar 43-50% masyarakat Suriah terutama pada sejumlah kota besar seperti Istanbul dan Ankara (Drewski & Gerhards, 2024). Politisasi kemudian menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Pada tahun tersebut isu mengenai politisasi pengungsi berakibat pada dinamika sosial yang terjadi di masyarakat lokal. Akibatnya beberapa kelompok tertentu kemudian memiliki pandangan yang berbeda dengan adanya arus pengungsi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Pemerintah pada akhirnya terus menerapkan kebijakan pengetatan dalam membatasi perbatasan (ECRE, 2022).

Selain itu, melalui data yang dikeluarkan oleh Syrian Barometer 2022 tanggapan atas beberapa pandangan negatif masyarakat lokal Turki menjadi lebih besar dari beberapa tahun sebelumnya. Melalui wawancara pada beberapa peserta FGD yang diinisiasi oleh presiden Erdogan, toleransi yang terjadi terhadap orang Suriah telah menurun. Pada awalnya mereka menganggap sebagai korban kemanusiaan berubah menjadi rasa yang intoleran (Erdogan, 2023). Beberapa tempat di Turki memberikan pandangan yang berbeda hingga pandangan mengenai sifat sentimen. Menurut keterangan, pandangan yang terjadi bukan saja akibat dari apa yang dilakukan oleh pengungsi Suriah di Turki. Melalui Syrian Barometer dijelaskan juga pandangan tersebut merupakan akibat dari politik identitas yang diperjuangkan oleh partai oposisi pada masa pemilu di Turki.

Pandangan Multikulturalisme dalam *Open Door Policy* di Turki

Open Door Policy awalnya dibuat berdasarkan pertimbangan multikultural. Dalam menerapkan kerangka kebijakannya, pemerintah menerapkan prinsip tentang kohesi sosial dan harmonisasi dalam menjawab proses dari penerimaan sosial (Erdogan, 2021). Proses dari kohesi sosial ini merupakan proses yang dibangun antara masyarakat lokal dan pengungsi Suriah. Kohesi yang lebih mengacu pada tingkat penerimaan, interaksi, dan solidaritas yang terjadi pada dinamika kedua kelompok ini. Sedangkan harmonisasi berhubungan dengan strategi kebijakan dalam praktiknya pada dinamika sosial yang lebih berkelanjutan (Erdogan, 2021). Melalui argumen kohesi sosial dan harmonisasi yang dijelaskan melalui Syrian Barometer 2020, pemerintah menjelaskan identitas Turki sebagai negara pluralis. Dalam menjelaskan identitasnya, pemerintah menolak pandangan asimilasi atau adopsi budaya dari kelompok mayoritas. Sehingga dalam hal ini, Turki menerapkan kebijakan yang lebih inklusif terhadap perbedaan identitas namun juga mengacu pada hak-hak kemanusiaan.

Sejalan dengan argumen pemerintah Turki, Will Kymlicka juga menjelaskan mengenai hak-hak minoritas dalam masyarakat multikultural. Kymlicka menjelaskan tentang negara multibangsa dan *polyethnic* yang mementingkan hak-hak kelompok minoritas termasuk di dalamnya adalah hak untuk mempertahankan bahasa, budaya, dan identitas mereka. Dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada pandangan negara *polyethnic* yang dimana keberagaman dari negara dibentuk karena adanya migrasi penduduknya. Kymlicka memperhatikan hak-hak kelompok dalam demokrasi liberal yang menekankan akan kesetaraan dari individu (Kymlicka, 1995). Dalam pandangan *polyethnic* terdapat kelompok etnis yang membutuhkan perlindungan terhadap diskriminasi. Kymlicka menawarkan kerangka kebijakan yang multikulturalisme dimana kelompok etnis mendapatkan hak khusus dalam perlindungannya. Selain itu Kymlicka turut memberikan kritik pada praktik “asimilasi” paksa terhadap keseluruhan norma dan adat dari kelompok mayoritas (Kymlicka, 1995). Hal tersebut berarti perbedaan dari beberapa aspek kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok imigran akan terintegrasi dan memberikan perspektif yang baru, bukan semakin menimbulkan keterpisahan dalam dinamika masyarakat. Bagi Kymlicka, pandangan terhadap perbedaan multikulturalisme sendiri menunjukkan akan hak kelompok yang tidak bertentangan dengan kebebasan individu. Namun, keberagaman melalui kebebasan individu tersebut yang memperkuat keadilan sosial dan kohesi masyarakat yang dituang dalam kebijakan berlandaskan pandangan multikulturalisme.

Pandangan mengenai multikulturalisme melalui dasar pembuatan kebijakan *Open Door Policy* dengan pandangan menurut Kymlicka, dapat dilihat mengenai penjelasan secara khusus mengenai konsep dari kohesi sosial. Namun melalui analisis dinamika antara pengungsi suriah dan masyarakat lokal Turki, penerapan konsep kohesi sosial tidak selamanya memberikan jawaban dalam proses integrasinya dalam masyarakat. Konsep kohesi sosial tidak selamanya menjawab argumen awal dalam penjelasannya mengenai integrasi dan harmonisasi yang terjadi di Turki (Erdogan, 2023). Pada awalnya presiden Erdogan bersama dengan partai AKP mengungkapkan narasi politik berdasarkan persamaan budaya, identitas saudara, dan tamu yang memiliki hubungan kekerabatan dalam faktor historis. Namun dalam praktiknya, penggunaan ungkapan kesamaan budaya, agama, dan kekerabatan melalui narasi politik tidak selamanya memiliki kontribusi yang tinggi dalam penerapan kohesi sosial. Seiring bertambahnya waktu penggunaan narasi tersebut dapat mengganggu komunitas dari mayoritas dalam hal ini masyarakat lokal dan pudarnya persepsi kesamaan budaya (Erdogan, 2023).

Baik Kymlicka dan Presiden Erdogan, keduanya tidak dapat menjawab argumen multikultural berdasarkan pandangan integrasi melalui kohesi sosial. Tantangan dari kedekatan budaya namun memiliki perbedaan identitas dan hidup bertahun-tahun akan muncul pencarian identitas baru (Erdogan, 2024). Hal tersebut berarti kebijakan yang berbasis pada kedekatan budaya dalam penerapannya mengenai kohesi sosial memiliki resiko yang terhambat.

Kebijakan tersebut tidak memiliki struktur yang jelas terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, terkesan lebih menggugulkan emosional, serta tidak adanya parameter ukur yang pasti mengenai bagaimana “kohesi sosial” tersebut dapat tercapai dalam dinamika bersama.

Sebagai contoh, penerapan dari *Open Door Policy* semula dirancang berdasarkan pada aspek kohesi sosial dan penerimaan perbedaan berdasarkan kemanusiaan. Tidak selamanya berjalan seperti apa yang dirancangkan sejak awal. Narasi politik Erdogan mengenai pengungsi sebagai “saudara” dan “tamu” yang harus diperjuangkan hak asasi manusia berubah menjadi gelombang besar yang dapat menjadi beban negara melalui proses sosial. Alih-alih penerapan kebijakan dapat menghasilkan dinamika yang terintegrasi dan terharmonisasi jangka panjang, malah menyebabkan polarisasi dalam masyarakat dalam menjawab arti dari kohesi sosial di kehidupan bersama. Baik argumen yang dicetuskan oleh Kymlicka atau Presiden Erdogan mengenai kohesi sosial dalam memberikan hak-hak individu terhadap migran, tidak dapat menjawab akan keberhasilan prinsip kohesi sosial yang berdasarkan pemikiran multikultural. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pola integrasi berdasarkan penilaian yang terstruktur melalui kebijakan. Dalam hal ini kebijakan tersebut tidak kemudian menghasilkan dinamika yang terpolarisasi namun lebih menekankan pada proses penerimaan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat yang *polyethnic*.

KESIMPULAN

Kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Turki dalam merespon krisis pengungsi Suriah dari tahun 2019 hingga 2024. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan, serta komitmen Turki terhadap ratifikasi dari *Convention and Protocol of Refugees*, dan diwujudkan dalam hukum nasional melalui *Law on Foreigner and International Protection* (LFIP). Hukum nasional tersebut mengatur tentang perlindungan kepada orang asing, pencari suaka, dan perlindungan sementara berdasarkan asas kemanusiaan dan prinsip *Non Refoulement*. Selain itu, pemerintah Turki membentuk kebijakan juga menggunakan pandangan multikultural. Pemerintah menerapkan kebijakan dalam kerangka kerjanya berdasarkan prinsip kohesi sosial. Prinsip tersebut mengatur tentang penerimaan dan interaksi yang ada dalam masyarakat melalui proses harmonisasi.

Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah, namun juga menghasilkan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat lokal di Turki. Meskipun kebijakan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ideologi kemanusiaan yang tercermin dalam pandangan multikulturalisme, dalam praktiknya kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Terutama terkait dengan peningkatan ketegangan sosial dan ekonomi yang timbul akibat kehadiran pengungsi Suriah yang semakin banyak. Polarisasi dalam masyarakat, diskriminasi, dan persaingan di pasar tenaga kerja menjadi beberapa masalah utama yang muncul sebagai akibat langsung dari kebijakan ini.

Hasil implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa konsep tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi tantangan yang ada. Polarisasi antara kelompok mayoritas dan minoritas semakin meningkat, dan integrasi sosial yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan ideal kebijakan dengan kenyataan di lapangan, yang menciptakan ketegangan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih inklusif dan penyesuaian kebijakan lebih lanjut diperlukan untuk menangani tantangan integrasi sosial dan meningkatkan keamanan manusia, baik bagi pengungsi Suriah maupun masyarakat lokal Turki. Pentingnya menekankan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi serta multikulturalisme secara lebih mendalam. Dalam mengatasi hal ini, diperlukannya upaya dari berbagai pihak dalam merumuskan solusi yang tepat terhadap dinamika sosial tanpa harus

menghadapi polarisasi, diskriminasi, dan stigma sosial antara masyarakat Turki dan Pengungsi Suriah.

REFERENSI

- Abidin, W., & Wibowo, P. (2024). Perubahan Kebijakan Turki: Open Door Policy Menjadi Border Wall Project Tahun 2015-2022 . *Global & Policy*, 12.
- Donelli, F. (2023, May 12). The Refugee Issue and the Turkish Elections: What's at Stake? Italian Institute for International Political Studies.
- Drewski, D., & Gerhards, J. (2024). Open doors for "brothers and sisters" in faith. In *Framing Refugees*. Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198904724.003.0004>
- ECRE. (2022, July 15). AIDA 2021 Update: Turkiye. European Council on Refugees and Exites.
- Erdogan, M. M. (2021). Syrian Barometer 2020: a Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkey. UNHCR.
- Erdogan, M. M. (2023). Syrian Barometer 2022: a Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkiye. *Atalay Konfeksiyon Matbaacılık ve Reklam İnş*.
- Erdogan, M. M. (2024). Syrian Barometer 2023: a Framework for Achieving Social Coheion witj Syrians in Turkiye. *Atalay Konfeksiyon Matbaacılık ve Reklam İnş*.
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Politica*, 5.
- Fiantika, F. R., Mohammad Wasil, Sri Jumiayati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, & Erland Mouw. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Gilley, B. (2015). Turkey, Middle Powers, and the New Humanitarianism. *Perceptions*, 20(1).
- Gumilar, A. (2016). Kepentingan Turki terhadap Pengungsi Suriah Studi Kasus Tahun 2011-2015. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hedemann, S. (2013). Syria's Adaptive Authoritarianism. *Middle East Political Science*.
- Hodali, D. (2024, July 4). Deportasi Tanpa Kepastian Bayangi Pengungsi Suriah di Turki. *Dw.Com*.
- Izzatinnisa, Yusra, M., & Jamilah, M. (2022). Repatriasi Pengungsi Suriah: Perubahan Kebijakan Turki dalam Merespon Krisis Pengungsi . *Politics, Humanities Law, International Relations and Social (PALITO)*, 1.
- Kamila, Z. T., & Mahendra, Y. C. (2023). Penyebab Warga Suriah Mengungsi ke Negara Turki pada Tahun 2011-2015. Universitas Brawijaya.
- Kırdar, M. G., Koç, İ., & Dayıoğlu, M. (2023). School integration of Syrian refugee children in Turkey. *Labour Economics*, 85, 102448. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102448>
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press.
- Maruf, M. (2022, October 25). Inflasi dan Kurs Turki Kacau, Negara Diambang Kebangkrutan. *CNBC Indonesia*.
- Nurdin, M. A. (2015). Kegagalan Politik Multikulturalisme dan Pelembagaan Islamofobia di Negara-Negara Barat. *Ilmu Ushuluddin*, 2.
- Polat, R. K. (2018). Religious solidarity, historical mission and moral superiority: construction of external and internal 'others' in AKP's discourses on Syrian refugees in Turkey. *Critical Discourse Studies*, 15(5), 500–516. <https://doi.org/10.1080/17405904.2018.1500925>
- Suryantama, M. D. (2021). Turkey's Open Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*.

- Tayfur, I., Günaydin, M., & Suner, S. (2019). Healthcare Service Access and Utilization among Syrian Refugees in Turkey. *Annals of Global Health*, 85(1). <https://doi.org/10.5334/aogh.2353>
- The Sphere Project. (2011). *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (3rd ed.). Hobbs the Printer.
- Turkish Government. (2013). *Law on Foreigners and International Protection*.
- UNCHR. (2024). *Mid-Year Trends*. UNCHR.
- UNHCR. (2025, May 31). *Operational Data Portal*.
- UNHCR. (n.d.). *Asylum-seekers*. Unhcr.Org.
- Utami, R. V. (2015, July 31). Erdogan: Turki Cukup Berkontribusi untuk Pengungsi. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150731171230-106-69391/erdogan-turki-cukup-berkontribusi-untuk-pengungsi>.
- Yuliansah, Syukur, S., & Susmihara. (2023). *Dinamika Konflik Suriah pada Masa Pemerintahan Bashar Al-Assad*. *Jurnal Sambas*, 6.
- Zuhal, K. D. (2020). *International Migrants as a Matter of Security: Open Door Policy and Syrians in Turkey*. *Guvenlik Bilimleri Dergisi*.
- Zulkarnain. (2017). *Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. *Jurnal Populis*.